

ABSTRAK

TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEGAWAI NEGERI ANALISIS DARI PSIKOLOGI KRIMINAL

(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

OLEH

ANDI SUPRATMAN

NPM : 10 840 0224

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri analisis dari psikologi kriminal. Adapun permasalahan yang dibahas adalah pembahasan tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi dan tentang kendala dan hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris dengan data yang digunakan adalah data primer dan di dukung data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan metode *Library Research* dan metode *Field Research*.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis berpendapat bahwa pegawai negeri-pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang yang sedang terganggu kejiwaannya dimana perilaku-perilaku yang dihasilkan adalah perilaku yang menyimpang (abnormal). Karena pada dasarnya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut tergolong orang yang mampu dari segi ekonominya. Hal ini sejalan dengan aliran psyciatrik yang dijelaskan oleh Sutherland yaitu: " gejala- gejala psikologis sebagai unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia karena itu merupakan faktor yang tak dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan".

Namun demikian adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri menurut Andi Hamzah adalah:

- a. Kurangnya gaji pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat.
- b. Latarbelakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi.
- d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.

Dengan faktor- faktor yang tersebut diatas bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini semakin berkembang dengan berbagai macam modus operandi yang semakin canggih, perkembangan fungsi teknologi seperti: computer, perkembangan bank yang menjadi sarana sebagai tempat pencucian uang semakin menjadikan pelanggaran hukum khususnya tindak pidana korupsi

tersebut semakin kompleks. Sehingga diharapkan sanksi yang diterapkan oleh oknum pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi bukan pula sekedar preventi, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna pula bagi pribadi terhukum dan yang lebih terpenting dari pada itu adalah sanksi yang diberikan dapat benar-benar memberi terapi yang melahirkan nilai keadilan dan kepastian hukum bagi khalayak umum.

